**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Mutu Pendidikan**
2. **Pengertian Mutu Pendidikan**

Menurut Joremo S. Arcaro mutu adalah bentuk representif dan karekter yang menggambarkan suatu barang atau jasa dimana diperuntukkan untuk memuaskan kebutuhan yang diharapkan sesuai target dan tujuan dalam dunia pendidikan, pengertian mutu mencakup target, tujuan dan hasil dari sebuah kualitas pendidikin[[1]](#footnote-2).

Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar menemukakan bahwa mutu pendidikan bergantung pada kemampuan sistem pendidikan yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi faktor proses agar menghasilkan hasil yang setinggi-tingginya[[2]](#footnote-3).

1. **Teori Mutu**

Beberapa teori tentang pelaksanaan dan peningkatan mutu dikemukakan oleh para ahli mutu seperti E. Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, Garvi dan Davis. Setelah ini akan kupas tuntas tentang teori peningkatan mutu tersebut.

* 1. **Teori William Edward Deming ( Siklus PDCA )**

PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check dan Act yaitu tahapan dalam meningkatkan proses (Process Improvement) yang saling berkaitan atau secara terus terusan seperti bumi yang tidak ada akhirnya. Konsep siklus PDCA ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang ahli manajemen kualitas yang bernama William Edwards Deming dari Amerika Serikat.

1. Plan (merencanakan: mengidentifikasi dan menganalisis masalah)

Tahap Plan adalah tahap untuk menetapkan target yang ingin dicapai dalam meningkatkan proses ataupun masalah-masalah yang ingin dipecahkan, kemudian menentukan Metode yang akan digunakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Pada Tahap Plan ini juga mencakup pembentukan Proses Peningkatan Tim (Process Improvement Team) dan melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki Tim tersebut serta batas waktu (Jadwal) yang diperlukan untuk melakukan perencanaan yang telah disepakati. Perencanaan terhadap pemakaian sumber daya lainnya seperti modal dan peralatan juga perlukan dipertimbangkan dalam Tahap Plan ini.

1. Do (melaksanakan: mengembangkan dan menguji solusi yang berpotensi)

Tahap Do adalah tahap penerapan atau melaksanakan semua yang telah direncanakan di Tahap Plan bagaimana menerapkan sistem, menghasilkan produk serta melakukan telaah data (data collection) yang kemudian akan dipergunakan untuk dasar dan analisis barang.

1. Check (memeriksa: mengukur seberapa maksimal pengujian sebelumnya dan mengkolaborasi apakah kemudian solusi yang didapatkan dari analisis mampu meningkatkan suatu produk).

Tahap Check adalah tahap memriksa dan menganalisis ulang serta mempelajari hasil dari pengaplikasian di tahap Do. Melakukan perbandingan antara hasil yang didapat yang telah dicapai dengan tujuan yang ditetapkan dan juga kesepakatan jadwal yang telah ditentukan.

1. Act (menindak: mengimplementasikan solusi yang telah ditingkatkan secara menyeluruhkah tersebut dapat ditingkatkan).

Tahap act adalah proses untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap hasil dari tahap analisis (check). Ada 2 jenis tindakan yang harus diterapkan berdasarkan prestasi yang dicapainya, antara lain :

* 1. Perbaikan Tindakan (Corrective Action) yang berupa solusi terhadap problem yang dihadapi dalam mewujudkan hasil memuaskan, Perbaikan Tindakan ini perlu diambil jika hasil yang diperoleh tidak mencapai pada target bersama.
	2. Tindakan Standarisasi (Standardization Action) yaitu sebuah tindakan memenuhi target minimal atau pemenuhan target yang menjadi dasar acuan, Tindakan Standarisasi ini dilaksanakan apabila terpenuhinya hasil Target yang telah ditetapkan. Siklus tersebut akan diulang lagi ke tahap Plan untuk meningkatkan proses selanjutnya sehingga terjadi peningkatan siklus proses yang terus menerus (Continuous Process Improvement). Manfaat dari PDCA antara lain :
		1. Memudahkan cara pemetaan pada wewenang dan tanggung jawab dari sebuah organisasi;
		2. Sebagai perbaikan pola system kerja dalam organisasi;
		3. Menyelesaikan dan mengendalikan problem secara teratur dan sistemik;
		4. Sebagai kegiatan yang terus menerus dalam rangka memperpendek proses kerja;
		5. Mengurangi pemborosan di tempat kerja sebagai upaya peningkatan produk[[3]](#footnote-4).

Terkait hakekat mutu dalam pendidikan, Deming mengemukakan 14 perkara sebagai berikut :

* + 1. Menciptakan konsistensi tujuan
		2. Mengadopsi filosofi mutu total
		3. Mengurangi kebutuhan pengujian
		4. Menilai sekolah sebagai sebuah bisnis yang harus ditargetkan
		5. Memperbaiki kuslitas dengan produk serta pengurangan biaya
		6. Belajar sepanjang hayat
		7. Kepemimpinan dalam pendidikan
		8. Mengeliminasi rasa takut
		9. Mengeliminasi hambatan kerberhasilan
		10. Menciptakan budaya mutu
		11. Perbaikan proses
		12. Membantu siswa berhasil
		13. Komitmen
		14. Tanggung jawab[[4]](#footnote-5).

Berdasarkan konsep Deming tentang peningkatan mutu tersebut dapat ditarik suatu asumsi dasar, Pertama, bahwa siklus PDCA adalah suatu langkah sistematis yang bersifat terus menerus (sirkuler) yang pada awalnya lebih menekankan pada perbaikan proses yang kemudian diikuti upaya mencari faktor penyebab khusus kegagalan. Bila penyebabnya telah ditemukan selanjutnya melakukan perubahan untuk perbaikan tujuan yang harus ditargetkan. Kedua, Dalam upaya pencapaian perbaikan mutu diperlukan konsistensi tujuan, komitmen, kerjasama dan demokrasi dalam satu organisasi yang komitmen dan saling menghargai potensi masing-masing. Ketiga, Kepemimpinan yang visioner, profesional dan bertanggungjawab, memiliki rasa simpati dan empati terhadap pencapaian produktivitas kerja (prestasi) baik dalam konteks individu maupun kolektif diimplementasikan dalam suatu upaya menciptakan kondisi warga sekolah yang kondusif dan berprestasi.

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, Deming menyatakan terdapat lima indikasi yang menggerogoti dalam dunia pendidikan yaitu :

1) Kurang konstannya tujuan.

2) Pola pikir jangka pendek.

3) Evaluasi prestasi individu.

4) Tingginya rotasi kerja.

5) Tampaknya angka yang menggunakan Manajemen.

Menurutnya kegagalan peningkatan mutu konteks dunia pendidikan lebih disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Umum terdiri dari: desain kurikulum yang lemah, bangunan yang kurang inovatif, lingkungan tidak mendukung, system-prosedur yang tidak diharapkan, jadwal kerja yang asal-asalan, sumberdaya yang jauh dari rata-rata, dan potensi staf yang tidak mendukung. Khusus yaitu: pengetahuan rendah dan anggota tidak terampil, motivasi kurang, kegagalan komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan

* 1. **Teori Trilogi Kualitas Joseph M. Juran**

Juran, seorang sarjana yang menempuh electrical engineering dilahirkan pada 24 Desember tahun 1904 di BrailaMoldova, pada tahun 1986 mengemukakan pendapatnya tentang teori mutu yakni Trilogi Kualitas *(The Quality Trilogy)*, yakni quality planning, quality control, dan quality improvement. Menurut Juran, kualitas adalah “kesesuaian dengan menerapkan *(fitness for use)*” bertujuan pada pemuasan pelanggan. Suatu kualitas ditentukan oleh tiga biaya yaitu penilaian, kegagalan, dan pencegahan (internal dan eksternal). Juran berpendapat bahwa faktor mendasar dari kualitas biaya adalah pencegahan dan penilaian. Peningkatan kualitas biaya akan searah dengan meningkatnya kualitas. Menurut Juran ”Quality is Expensive”, karena penilaian dan pencegahan akan menghabiskan biaya terbesar di perusahaan untuk menurunkan modal kegagalan. Peningkatan kualitas, hendaknya produsen mencegah dan menilai terlebih dahulu kemungkinan gagalnya produk yang dipasarkan di masyarakat dan tidak sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan prediksi asumsi, sekalipun harga tinggi namun dengan turunnya kegagalan hingga mendekati angka nol persen akan dapat meningkat kualitas dari produk tersebut, dampaknya modal rework dapat diminimalisir dan nilai barang dan jasa dapat peningkatan di pasaran, serta memenuhi ekspektasi pelanggan. Ketiga Konsep mutu Juran tersebut dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini[[5]](#footnote-6):

* + 1. Kualitas Perencanaan (quality planning), adalah tahapan proses yang meninjau pelanggan dan tahapan yang akan menyalurkan produk dan jasa melalui karakteristik yang benar dan kemudian mengirim pengetahuan ini ke seluruh pemegang perusahaan bertujuan memuaskan para pelanggan. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keutuhan pelanggan dengan cara mempermudah dan memenuhi semua kebutuhan mereka, pengembangan produk atau jasa sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, serta terjadinya produksi barang dan jasa yang berkembang agar lebih efektif dan efesien.
		2. Mengendalikan Kualitas (quality control), adalah tahapan proses dimana suatu barang harus dievaluasi dan diperiksa, sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan para pelanggan. Problem yang telah diketahui dipecahkan, misalnya ada mesia yang rusak segera dibetulkan.
		3. Memperbaiki Kualitas (quality improvement), adalah tahapan kinerja dimana mekanisme yang sudah benar dipertahankan sehingga mutu dapat tercapat secara berkelanjutan. Hal ini meliputi sumber alokasi, menugasi seseorang untuk melakukan proyek mutu, memberikan pelatihan para karyawan yang terlibat aktif dalam mutu proyek dan selanjutnya menetapkan struktur permanen demi mengejar dan mempertahkan mutu serta program yang telah terwujud sebelumnya.

Dengan pelaksanaan perencanaan kualitas yang akurat akan sangat bermanfaat dan memberikan nilai lebih bagi dunia industri dalam membuat serta menetapkan langkah strategis agar senantiasa para konsumen merasa puas melalui pemakaian dan ketersediaan produk yang berkualitas. Searah dengan ketiga fungsi manajemen di atas, Juran menjelaskan perbedaan 2 jenis mutu, yaitu :

* + 1. Mutu Strategis, yaitu kualitas produk di tingkat manajer (yang bersifat strategis). Misalnya sistem dan kebijakan yang berlaku.
		2. Mutu Teknis, yaitu kualitas produk di tingkat operasional yang secara teknis seperti bentuk suatu desain jasa atau barang yang diberikan kepada pelanggan. Selain konsep Trilogi Kualitas, Juran juga mengemukakan sepuluh langkah untuk memperbaiki kualitas yang lebih dikenal dengan

Juran’s Ten Steps to Quality Improvement:

* + 1. Kesadaran membentuk kebutuhan sehingga mengakibatkan perbaikan.
		2. Menetapkan tujuan perbaikan.
		3. Mengorganisasikan.
		4. Menyediakan pelatihan.
		5. Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahanmasalah.
		6. Melaporkan perkembangan.
		7. Memberikan penghargaan.
		8. Mengkomunikasikan hasil-hasil.
		9. Mempertahankan serta menyimpan hasil ayang akan ditargetkan.
		10. Memelihara peluang dengan melakukan perbaikan sistem reguler perusahaan.

Juran meyakini bahwa apabila suatu perusahaan ingin mencapai kualitas dan mampu bersaing ditingkat dunia maka mereka harus melakukan tiga langkah strategis yang dikenal dengan Juran’s tiga tahapan proses kualitasnya, yakni :

* + 1. Tercapainya struktur perbaikan melalui komunikasi yang berkesinambungan dengan cara pengabdian dan waktu yang mendesak.
		2. Membentuk program guna memberikan pelatihan.
		3. Mewujudkan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi dan komitmen[[6]](#footnote-7).

Terkait dengan penyebab munculnya masalah-masalah mutu, Juran mengemukakan istilah yang terkenal dengan Aturan 85/15. Artinya bahwa masalah muncul akibat desain mutu yang kurang baik, sehingga mutu yang berkualitas melalui penerapan sistem yang benar dan tepat. Menurut Juran, Manajemen Mutu Strategis *(Strategic Quality Management)* adalah tahapan proses tiga komponen yang direkomendasikan untuk staf yang berbeda sehingga dapat memberikan peningkatan mutu.

Sehingga dapat diasumsikan bahwa manajer senior mampu memiliki pemikiran yang subtantif tentang organisasi manajernya serta pengontrolan staf dalam meningkatkan mutu yang lebih baik[[7]](#footnote-8).

* 1. **Teori Kualitas dari Philip B. Crosby**

Philip Crosby memberikan pemikirannya dalam mutu yang dibagi menjadi dua pemikiran yaitu[[8]](#footnote-9) :

* + 1. Mutu merupakan sesuatu yang diperoleh ide secara gratis
		2. Ide kegagalan ketidakberhasilkan akan dapat dihilangkan dengan aknum yang antusias ingin memperbaikinya.

Dalam bukunya Quality Is Free, Crosby mengemukakan bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik.

Teori tanpa cacat yang dikemukakan Crosby adalah keterlibatan ide dalam penempatan sistem di sebuah wilayah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya selalu dikerjakan dengan metode yang tepat sejak pertama kali dan selamanya. Menurut Crosby definisi kualitas adalah "Tanpa cacat", yaitu kesesuaian spesifikasi produk mencapai seratus persen. Crosby juga menyatakan bahwa pengaturan perusahaan harus mengambil modal kualitas sebagai subtansi dari sistem keuangan. Empat prinsip *“Zero Defects”* yaitu[[9]](#footnote-10) :

1. Kualitas adalah sesuai dengan syarat. Setiap layanan atau produk seharusnya menjadi deskripsi dari kebutuhan pelanggan.
2. Pencegahan cacat produk lebih peruntukkan untuk pemeriksaan koreksi dan kualitas. Kedua prinsip ini didasarkan pada pengamatan bahwa mencegah kecacatan lebih tidak merepotkan, lebih pasti dan lebih murah daripada menemukan dan memperbaikinya.
3. Tnpa cacat merupakan standarisasi kualitas. Prinsip ketiga didasarkan pada persyaratan sifat normatif: apabila persyaratan mengungkap apa yang benar diperlukan, maka segala unit yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat memuaska setiap kebutuhan pelanggan. Jika produk yang tidak dapat memenuhi persyaratan ternyata mampu memnuhi kebutuhan, maka persyaratan harus dirubah guna mewujudkan realitas.
4. Kualitas dikontekskan dalam istilah moneter, ketidaksesuaian harga (PONC). Prinsip ini menjadi kunci bagi metodologi. Crosby percaya bahwa setiap biaya terdapat cacat, yang sering bersembunyi. Biaya tersebut mencakup waktu pengerjaan ulang, pemeriksaan, bahan terbuang, tenaga kerja, pendapatan yang hilang dan modal dari pelanggan yang tidak puas.

Program mutu yang dikemukakan Crosby terdiri dari 14 langkah yaitu :

* + 1. Komitmen dalam Manajemen
		2. Tim peningkat mutu
		3. Mengukur mutu
		4. Mengukur modal mutu
		5. Membentuk Kesadaran mutu
		6. Meperbaiki kegiatan
		7. Rencana tanpa cacat
		8. Memberikan pelatihan pengawas
		9. Hari yang tidak cacat
		10. Tersusunnya tujuan
		11. Menghapus adanya kesalahan
		12. Menakui
		13. Para pemangku mutu
		14. Mengulang dan mencoba`[[10]](#footnote-11)

Ketiganya memiliki gagasan tentang seperti apa mutu harus diukur dan dikelola, jelas bahwa Crosby, Juran, dan Deming semuanya memiliki tujuan yang sama. Perumusan Deming bahwa Pelanggan dapat menilai apakah mutu terdapat pada layanan atau produk, Juran menjelaskan tentang mutu, dan Crosby memberikan interpretasi manajemen mutu dikaitkan dengan pelanggan sebagai akhir penentu dari kualitas suatu jasa atau produk tertentu. Ketiganya telah menghasilkan perbedaan yang pasti dari pengertian mutu, meskipun dari berbagai perbedaan tingkatan. Dan juga ketiganya mengharuskan adanya umpan balik pada setiap mekanisme yang dibuat untuk mengelola dan mengeukur kualitas : Teori Deming adalah berkesinambungannya *Improvement Helix*, sedangkan Juran lebih tersohor dengan Triloginya, dan Crosby menekankan pada Harga *Non-Conformance*. Perbedaannya adalah terdapat pada perspektif yang disampaikan. Perspektif Deming menyatakan bahwa penentu kebijakan adalah pelanggan dan bergantung pada pasar dimana pelanggan akan memberikan penafsiran mutu suatu jasa atau produk. Sementara Juran mengemukakan bahwa pasar erat kaitannya dengan mutur, dimana faktor penentu dirancang untuk menerjemahkan visi mutu untuk menghasilkan suatu produk. Perspektif Crosby menjustifikasi bahwa manajemen ditentukan oleh mutu seseorang baik atau tidaknya tujuan dari mutu yang terpenuhi, serta pembiayaan yang harus ditanggung. Sebagai kesimpulan akhir, bahwa juran, Crosby, dan Daming memiliki suatu pendekatan yang sangat berbeda tentang manajemen pengembangan mutu, tetapi pada akhirnya ketiga tokoh menekankan pada prinsip dasar yang sama.

Selain ke tiga tokoh mutu tersebut, juga dikenal tokoh mutu yang lain seperti Feigenbaum, Garvi dan Davis yang memiliki konsep mutu agak berbeda satu sama lain. Berikut konsep mutu ketiga tokoh tersebut[[11]](#footnote-12)

* 1. **Teori Mutu Feigenbaum**

Menurut Feigenbaum, mutu merupakan pemenuhan kepuasan pelanggan *(full customer satisfaction)*. Feigenbaum memebrikan statment suatu produk dianggap bermutu apabila telah memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen akan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Hal penting Feigenbaum bahwa (1) kualitas harus ditafsirkan pada hal kepuasan pelanggan, (2) kualitas merupakan banyak dimensi dan harus mengandung pengertian secara komprehensif, dan (3) terjadinyadi perubahan kebutuhan dan yang menjadi harapan pelanggan, maka mutu menjadi dinamis.

* 1. **Teori Mutu Garvin dan Davis**

Menurut keduanya mutu merupakan sebuah kondisi dinamik yang berhubungan dengan tenaga kerja, proses, produk, dan lingkungan yang memenuhi serta tugas atau terlampaui padaharapan pelanggan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, proses produksi dan tugas serta perubahan lingkungan perusahaan agar dapat memenuhi produk dan melebihi harapan konsumen. Dalam dunia pendidikan upaya untuk menghasilkan mutu harus memperhatikan empat hal mendasar, yakni :

1) Terciptanya situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan situasi “kalah-menang” diantara pihak yang mempunyai kepentingan dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dapat ditafsirkan terutama antara staf lembaga dengan pimpinan lembaga harus terjadi kondisi yang terus menguntungkan satu sama lain guna meraih mutu jasa/produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

2) pengembangan motivsi intriksik sangat diperlukan dalam mengembangkan mutu. Setiap warga sekolah dalam lembaga pendidikan harus mempunyai motivasi bahwa hasil kegiatannya telah mencapai mutu tertentu yang berkembang secara terus menerus, terutama hal itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan/pengguna.

3) Keharusan pimpinan harus berorientasi pada hasil dan proses jangka panjang.

4) Keterpaduan mutu dalam manajemen dalam pendidikan bukanlah suatu proses yang bisa dapat dirubah dalam waktu yang begitu singkat, tetapi proses pada jangka panjang yang konsisten dan terus menerus. Menggerakkan segala sesuatu kemampuan lembaga pendidikan dalam mencapai mutu yang ditetapkan, menjadi keharusan dikembangkan adanya kerjasama antar unsur yang menjalani proses mencapai hasil mutu. Janganlah sampai terjadi persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut. Mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus bekerjasama[[12]](#footnote-13).

Pelaksanaan Mutu pendidikan meliputi pelaksanaan mutu delapan standar pendidikan nasional yaitu; pelaksanaan mutu standar isi, pelaksanaan mutu standar proses, pelaksanaan mutu standar kompetensi lulusan, pelaksanaan mutu standar tenaga pendidik dan kependidikan, pelaksanaan mutu standar pengelolaan, pelaksanaan mutu standar sarana prasaran, pelaksanaan mutu standar pembiayaan dan peleksanaan mutu standar penilaian.

1. **Indikator Mutu Pendidikan**

Nurhasan mengemukakan bahwa kriteria atau indikator yang dapat dijadikan ukuran mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan,misalnya : tes tertulis, anekdot, skala sikap. Dalam konteks pendidikan, indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengarah pada prestasi yang dicapai oleh lembaga sekolah pada setiap waktu tertentu ( misalnya : setiap semster, setahun, 5 tahun,dan sebagainya ). Prestasi yang diraih dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti : ulangan umum, UN, atau prestasi bidang lain, misalnya prestasi dibidang olah raga dan seni. Bahkan hasil capaian sekolah berupa situasi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, dan sebagainya[[13]](#footnote-14).

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan**

Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah semua komponen yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari sumber daya sekolah yang ada. Komponen dan sumber daya sekolah menurut Subagio Admodiwirio terdiri dari dana (*money*), (*man*), sarana dan prasarana (*material)* serta peraturan (*policy)[[14]](#footnote-15)*.

1. **Standar Mutu Pendidikan**

Secara nasional mutu pendidikan yang berstandar merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan ( SNP) meliputi:

1. Standar Isi

Standar isi merupakan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kajian bahan kompetensi, kompetensi pada mata pelajaran, dan silabus pembelajaran wajib dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, mencakup tingkat kompetensi dan lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang tertentu. Standar isi meliputi struktur kurikulum, kerangka dasar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, beban belajar, dan kalender akademik.

Kurikulum jenis pendidikan kejuruan, umum, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas : a) kelompok pelajaran akhlak mulia dan agama, b) kelompok pelajaran kewarganegaraan, c) kelompok pelajaran teknologi dan ilmu pengetahuan, d) kelompok pelajaran estetika, e) kelompok pelajaran olah raga, jasmani, dan kesehatan. Beban belajar untuk SMA/MA, menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing.

Beban belajar untuk sekolah menengah atas pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester. Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

1. Standar Proses

Standar proses adalah standar pendidikan nasional yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses untuk sekolah dasar dan menengah menurut Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007 meliputi perencanaan dalam proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan ( SKL) sebagaimana yang dimaksud oleh PP Nomor 19 tahun 2005, Pasal 1 ayat (4) adalah kualifikasi terhadap kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kcerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan melaksanakan pendidikan lebih lanjut.

1. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Seorang pendidik diwajibkan telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai pelopor pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik pada Madrasah Aliyah harus memiliki : (a) kualifikasi pendidik minimum diploma empat (DIV) atau sarjana (S1), (b) latar belakang pendidikan yang tinggi dengan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan; dan (c) guru telah memiliki sertifikat mengajar. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi TU terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan tenaga laboratarium.

1. Standar Sarana Prasarana

Standar sarana prasarana merupakan standar pendidikan nasional yang berhubungan dengan kriteria minimal tentang tempat berolah raga, tempat beribadah, ruang belajar, laboratarium, perpustakaan, bengkel kerja, tempat berkreasi, tempat bermain, dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Standar tersebut disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini selanjutnya dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 mengenai standar sarana prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

1. Standar Pengelolaan.

Didalam Peraturan Pemerintah Pasal 49-61 bab VIII Nomor 19 tahun 2005 menjelaskan pengelolaan dalam satuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemitraan, partisipasi, kemandirian, akuntabilitas dan keterbukaan. Setiap sekolah harus memiliki pedoman yang mengatur mengenai : (a) KTSP dan silabus;(b) kalender pendidikan dan akademik; (c) struktur organisasi satuan pendidikan;(d) pembagian tugas diantara pendidik;(e) pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (f) peraturan akademik;(g) tata tertib satuan pendidikan, yang meliputi tata tertib peserta didik, tenaga kependidikan dan pendidik, serta pemeliharaan sarana prasarana dan penggunaannya; (h) kode etik hubungan antara warga sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat.; (i) biaya operasional satuan pendidikan. Selain itu Setiap sekolah yang dikelola atas acuan RKT yang merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menengah sekolah selama masa 4 tahun.

1. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur biaya operasional dan dan komponen sekolah yang berlaku dalam satu tahun. Standar pembiayaan sekolah terdiri atas biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi pengembangan sumberdaya manusia, biaya penyediaan sarana prasarana, dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi biaya sekolah yang harus ditanggung sekolahk untuk dapat terlaksananya proses pembelajaran secara sistemik dan berkelanjutan. Biaya operasional sekolah meliputi tenaga kependidikan dan gaji pendidik serta tunjangan yang melekat pada bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, gaji, dan biaya operasi sekolah langsung berupa air, jasa telekomunikasi, daya, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, uang lembur, pajak, asuransi, konsumsi, dan lain sebagainya.

1. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan merupakan standar pendidikan nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar yang dillakukan oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk perbaikan hasil, kemajuan, dan memonitor proses dalam bentuk ujian harian, ujian tengah semester, ujian semester, dan ujian kenaikan kelas.

1. **Program Gerakan Literasi Sekolah (GLS)**
2. Pengertian Program GLS

Pengertian Literasi Sekolah dalam konteks GLS merupakan sebuah proses mendalam dalam memahami dan mengakses segala informasi melalui pemanfaatan segala sumber belajar serta memanfaatkan fasilitas pembelajaran disekolah[[15]](#footnote-16).

Pengertian juga dijelaskan Literasi menurut Kemendikbud adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan mengakses, sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain menulis, melihat, membaca, menyimak, dan berbicara. GLS merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bersifat pertisipasi dengan melibatkan warga sekolah (pengawas sekolah, siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, kepala sekolah, komite sekolah, atau wali murid siswa), akademisi, penerbit, media masa, masyarakat dan pemangku kepentingan di bawah aturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan.

Gerakan literasi sekolah menurut Kemendikbud adalah gerakan sosial dengan dukungan mengkolaborasi berbagai elemen. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan berupa proses pembiasaan siswa. Pembiasan yang telah dilakukan guru kemudian akan ditirukan oleh semua warga sekolah termasuk siswa akan menjadi dorongan semua siswa untuk selalu membiasakan belajar melalui pembiasaan membaca selama 15 menit dalam proses belajar mengajar.

Kegiatan literasi ini dilaksanakan guna memotivasi minat dan budaya siswa membaca buku di sekolah. Ditjen Dikdasmen menyatakan bahwa kegiatan literasi dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi berupa kearifan lokal, nilai-nilai budi pekerti, nasional, dan global yang sesuai dengan perkembangan siswa.Terobosan penting ini hendaknya juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, hingga satuan pendidikan. Pelibatan orang tua siswa dan masyarakat juga menjadi komponen penting dalam GLS.

1. Konsep Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan literasi dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

* 1. Berkesinambungan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, tidak bergantung pada kebijakan pemerintah. Literasi harus menjadi program solusi utama pemerintah yang selalu dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekia, remaja, orang tua, dan seluruh masyarakat sehingga terbentuk budaya literasi di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

* 1. Terintegrasi

Pelaksanaan literasi harus terintegrasi dengan program yang dilaksanakan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan maupun lembaga lain, termasuk nonpemerintah. Dengan demikian, literasi dapat menopang pada program-program sekolah.

* 1. Melibatkan Semua pemangku kebijakan

Sebagai suatu gerakan, literasi harus memberikan peluang dan kesempatan untuk keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik secara individual maupun kelembagaan. Literasi harus menjadi kekayaan bersama, mudah dilaksanakan, dan menyenangkan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

1. Dimensi Literasi
2. Literasi Baca dan Tulis

Literasi baca tulis adalah kecakapan dan pengetahuan untuk menulis, membaca, menelusuri, mencari, mengolah, dan memahami informasi untuk menanggapi, menganalisis, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai mengembangkan pemahaman, tujuan, dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial[[16]](#footnote-17).

1. Literasi Numerasi

Literasi numerasi merupakan kecakapan dan pengetahuan untuk :

(1)bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam symbol dan angka matematika untuk memecahkan problem praktis dalam berbagai bentuk konteks dalam kehidupan sehari-hari; (2) dapat menganalisis informasi yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk (tabel, grafik, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.

1. Literasi Sains

Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

1. Literasi Digital

Literasi digital adalah kecakapan dan pengetahuan untuk menggunakan alat-alat komunikasi, media digital, atau jaringan dalam menggunakan, menemukan, mengevaluasi, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, cermat, cerdas, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Literasi Finansial

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (1) pemahaman tentang konsep dan risiko, (2) keterampilan, dan (3) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

1. Literasi Budaya dan Kewargaan

Literasi budaya adalah kecakapan dan pengetahuan dalam bersikap dan memahami terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan merupakan kecakapan dan pengetahuan dalam memahami kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat.

1. Ranah GLN
2. Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan literasi sekolah dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar sekolah yang didukung oleh orang tua dan masyarakat[[17]](#footnote-18).

1. Gerakan Literasi Keluarga

Gerakan literasi keluarga dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya literasi bagi keluarga, dan pelaksanaan kegiatan literasi bersama keluarga. Semua anggota keluarga bisa saling memberikan tauladan dalam melakukan literasi di dalam keluarga dengan berbagai macam variasi kegiatan.

1. Gerakan Literasi Masyarakat

Gerakan literasi masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan yang beragam di ruang publik, penguatan fasilitator literasi masyarakat, perluasan akses terhadap sumber belajar, dan perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi.

1. Daya Dukung dan Tata Kelola

Gerakan Literasi Nasional tumbuh berdasarkan berbagai kegiatan literasi yang sudah dikelola unit-unit utama di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. GLN ini adalah upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dalam menetapkan kebijakan GLN, menghimpun semua potensi, serta memperluas keterlibatan publik untuk membudayakan dan menumbuhkembangkan literasi di Indonesia.

Pengorganisasian dan pengelolaan Gerakan Literasi Nasonal ini merupakan koordinasi seluruh pemangku kepentingan atau ekosistem pendidikan yang terkait dengan penyelenggarakan GLN. Seluruh pelaku membentuk tim dan kolaborasi secara menyeluruh sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing dalam melaksanakan Gerakan Literasi Nasional[[18]](#footnote-19).

1. Pelaksana dan Peran Pemangku Kepentingan GLN

Gerakan Literasi Nasional memiliki prinsip berkesinambungan, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kebijakan. Secara sederhana, Gerakan Literasi Nasional ini adalah gerakan milik masyarakat Indonesia. Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional yang diimplementasikan di tiga ranah, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Fungsi dan peranan masing-masing pihak dideskripsikan sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	* + Membuat peraturan tentang pelaksanaan GLN;
		+ Menyusun kebijakan pelaksanaan GLN;
		+ Melakukan sinergi dan implementasi kebijakan GLN dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, media massa, komunitas, dll.;
		+ Menyusun dan mengembangkan materi GLN;
		+ Melakukan sosialisasi dan menumbuhkan inisiasi pelaksanaan GLN;
		+ Membuat penyaluran donasi buku melalui http:// donasibuku.kemdikbud.go.id;
		+ Membuat laman berisi informasi dan konten tentang GLN;
		+ Melaksanakan pengembangan SDM GLN;
		+ Memberikan dukungan sarana dan prasarana GLN;
		+ Memberikan pendampingan pelaksanaan GLN; dan
		+ Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan GLN.
2. Kementerian/Lembaga Lain
	* Membuat peraturan, kebijakan, serta program literasi untuk mendukung GLN sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup kementerian/lembaga masing-masing;
	* Menjadi mitra dalam pelaksanaan program GLN sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas masing-masing;
	* Membuat dan mengembangkan materi GLN sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas masing-masing; dan
	* Mendukung pengembangan implementasi GLN dalam bentuk penyediaan bahan bacaan bermutu, penyediaan sarana dan prasarana, kampanye/sosialisasi, penguataan kapasitas fasilitator literasi, dll.
3. Pemerintah Daerah
	* Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga daerah;
	* Membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan GLN di daerah;
	* Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan GLN di daerah;
	* Mengembangkan materi GLN pada setiap ranah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan geografis, dll.;
	* Membangun sarana dan prasarana penunjang GLN di daerah;
	* Menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat;
	* Melakukan sinergi dan implementasi GLN dengan para pemangku kepentingan di daerah;
	* Memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan GLN pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan
	* Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi GLN di daerah.
4. Kelurahan/Desa
	* Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa;
	* Membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan GLN di desa;
	* Membangun sarana dan prasarana penunjang GLN di desa;
	* Melakukan sinergi dan implementasi GLN dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh msyarakat; dan
	* Mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan GLN di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
5. Kepala Sekolah
	* Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
	* Melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
	* Menyusun RKS dan RKAS yang mengakomodasi program GLN;
	* Mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program GLN;
	* Memfasilitasi tenaga kependidikan dan pendidik dalam mengimplementasikan program GLN di sekolah;
	* Mendampingi tenaga kependidikan dan pendidik dalam mengimplementasikan program GLN;
	* Mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
	* Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
	* Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLN di sekolah;
	* Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan
	* Membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan GLN
6. Pengawas pendidikan
	* Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;
	* Mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/ keunggulan sekolah binaan dalam implementasi GLN;
	* Memetakan praktik baik implementasi GLN di sekolah-sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
	* Mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan GLN sesuai dengan karakteristik sekolah;
	* Mengevaluasi implementasi GLN di sekolah binaan;
	* Mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi GLN di sekolah binaan;
	* Membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat GLN;
	* Memastikan GLN diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktik literasi pada metode dan kurikulum pembelajaran di sekolah binaan; dan
	* Membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan gerakan literasi di sekolah binaan.
7. Guru Tutor/Pamong Pendidikan Nonformal
	* Memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
	* Menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan GLN;
	* Menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
	* Membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
	* Mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan program GLN;
	* Mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis GLN;
	* Melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis GLN;
	* Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLN; dan
	* Membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan GLN di sekolah.
8. Komite Sekolah/Masyarakat
	* Memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat dan sekolah;
	* Mendukung pelaksanaan program GLN secara mandiri dan bergotong royong;
	* Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLN;
	* Membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan wali murid serta masyarakat;
	* Menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
	* Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLN.
9. Tenaga Kependidikan
	* Memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
	* Mendukung terbentuknya relasi yang baik antartenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah; dan
	* Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis GLN.
10. Komunitas Literasi dan Komunitas Masyarakat
	* Memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat;
	* Mendukung pelaksanaan program GLN secara mandiri dan bergotong royong;
	* Memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program GLN;
	* Menggerakakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung GLN;
	* Mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat; dan
	* Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program GLN.
11. Implementasi Program Literasi Sekolah (GLS)
12. Strategi Gerakan Literasi Nasional

Untuk mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah baik di ranah sekolah, keluarga, maupun masyarakat, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana. Ada lima komponen strategi yang dapat mendukung terlaksananya Gerakan Literasi Sekolah, yaitu kapasitas fasilitator, ragam dan jumlah sumber belajar bermutu, akses terhadap cakupan peserta belajar, sumber belajar, dan pelibatan publik, serta tata kelola. Kelima strategi ini diterapkan di setiap ranah literasi dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

1. Penguatan Kapasitas Fasilitator

Fasilitator literasi merupakan ujung tombak gerakan literasi yang membantu dan mendorong masyarakat Indonesia dalam menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan. Pada ranah keluarga, fasilitator literasi terdiri atas orang tua dan atau anggota keluarga. Pada ranah sekolah, fasilitator literasi terdiri atas kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas, serta komite sekolah. Pada ranah masyarakat, fasilitator literasi terdiri atas pengelola perpustakaan publik dan pegiat literasi atau taman baca. Peran fasilitator literasi sangat strategis dalam meningkatkan budaya literasi.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas fasilitator menjadi satu-sataunya upaya yang harus dilakukan.

1. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu

Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu menjadi syarat penting ketika GLN dilaksanakan. Hingga saat ini, sumber belajar bermutu yang berupa bahan bacaan masih kurang, baik dari segi jumlah, subjek dan jenis bacaan, maupun kualitas bacaan. Bahan bacaan yang tersedia tidak banyak pilihan, monoton pada tema-tema tertentu saja, dan tidak sesuai pula dengan jenjang kebutuhan pembaca. Sumber belajar yang berkualitas dan memadai masih dipandang kurang mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan bahan bacaan literasi dalam bentuk digital merupakan pilihan yang tepat. Sumber belajar yang kaya dan beragam memberikan keleluasaan bagi pelaku literasi untuk mengakses, memanfaatkan, dan mengembangkan kegiatan literasi.

1. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar

Selain ketersediaan sumber belajar, keberhasilan kegiatan literasi pun perlu didukung dengan adanya kemudahan untuk mengakses sumber belajar tersebut. Agar masyarakat dapat menjangkau sumber-sumber belajar dengan mudah, perlu ada sarana dan prasarana yang mendukung, seperti layanan taman bacaan dan pojok baca di tempat umum. Kemudahan akses terhadap sumber belajar berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta belajar. Semakin banyak sumber pembelajaran literasi yang mudah diakses oleh masyarakat, semakin meningkat pula ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan literasi.

1. Peningkatan Pelibatan Publik

Kesuksesan gerakan literasi membutuhkan partisipasi aktif semua pihak. Pelaksanaan gerakan literasi di semua satuan pendidikan melibatkan semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota. Pada lingkup eksternal Kemendikbud, pihak-pihak yang dapat terlibat adalah perguruan tinggi, Perpusnas, Ikapi, lembaga donor, dan lain-lain. Gerakan Literasi Nasioanal juga memerlukan keterlibatan unsur masyarakat, seperti lembaga masyarakat di bidang pendidikan, perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan para tokoh masyarakat. Selain itu, dunia industri pun dapat dilibatkan dalam gerakan ini melalui pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Kesuksesan Gerakan Literasi Nasional dapat dicapai apabila tiap-tiap pemangku kepentingan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program literasi sesuai dengan perannya masing-masing.

1. Penguatan Tata Kelola

Mekanisme pengelolaan ekosistem pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi salah satu strategi penopang kesuksesan GLN. Penguatan tata kelola yang dilakukan oleh pelaku literasi di berbagai ranah merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak untuk mewujudkan kesuksesan gerakan ini. Penguatan tata kelola GLN dimaksudkan agar sinergitas para perumus kebijakan, pendanaan, dan pelaksana di tingkat lapangan tetap terjamin. Untuk itu diperlukan kejelasan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Gerakan Literasi Sekolah

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan program literasi yang programnya banyak dilakukan di sekolah dengan melibatkan siswa, tenaga kependidikan dan pendidik dan, serta orang tua[[19]](#footnote-20). GLS dilakukan dengan cara praktik baik tentang literasi dan menjadikannya sebagai budaya serta kebiasaan di lingkungan sekolah. Literasi juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua rangkaian kegiatan siswa dan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidik dan tenaga kependidikan tentu memiliki kewajiban moral sebagai teladan dalam hal berliterasi. Agar lebih masif, program GLS melibatkan partisipasi publik, seperti pegiat literasi, orang tua, tokoh masyarakat, dan profesional. Keberhasilan berliterasi di sekolah perlu diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan budaya literasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada lima aspek strategi yang sudah ditetapkan.

1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
2. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan literasi pada pembelajaran;
3. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan dalam pembuatan mainan edukatif berbasis literasi; dan
4. Forum diskusi bagi warga sekolah untuk mengembangkan kegiatan literasi dan menigkatkan kemampuan berliterasi.
5. Penigkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
6. Penyediaan bahan bacaan nonpelajaran yang beragam;
7. Penyediaan alat peraga dan mainan edukatif yang mendukung kegiatan literasi;
8. Penyediaan bahan belajar literasi dalam bentuk digital; dan
9. Program menulis buku bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan.
10. Perluasan Akses terhadap Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar
11. Pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi;
12. Penyediaan laboratorium yang berkaitan dengan literasi, misalnya, laboratorium bahasa, sains, finansial, dan digital;
13. Penyediaan pojok baca, baik di tiap kelas maupun di tempat-tempat strategis di sekolah;
14. Pengoptimalan perpustakaan sekolah;
15. Penyelenggaraan *open house* oleh sekolah yang sudah mengembangkan literasi;
16. Program pengimbasan sekolah; dan
17. Pelaksanaan kampanye literasi.
18. Peningkatan Pelibatan Publik
19. Pelaksanaan sesi diskusi dengan tokoh atau pegiat berbagai bidang literasi mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan bidang yang mereka kuasai;
20. Pelaksanaan festival atau bulan literasi yang melibatkan pakar, pegiat literasi, dan masyarakat umum; dan
21. Pelibatan BUMN dan DUDI dalam pengadaan bahan bacaan dan kegiatan literasi di sekolah.
22. Penguatan Tata Kelola
23. Pengalokasian waktu atau jadwal khusus untuk melakukan berbagai kegiatan literasi di sekolah;
24. Pengalokasian anggaran untuk mendukung literasi di sekolah;
25. Pembentukan tim literasi sekolah yang terdiri atas kepala sekolah, pengawas, guru, dan wakil orang tua peserta didik dengan tugas memantau berjalannya kegiatan-kegiatan literasi di sekolah;
26. Pembuatan kebijakan yang mengatur kegiatan literasi di sekolah sehingga dapat memaksimalkan keterlibatan semua warga sekolah; dan
27. Penguatan peran komite sekolah untuk membangun relasi kerja sama dan komitmen dalam melaksanakan kegiatan literasi.
28. Gerakan Literasi Keluarga

Gerakan Literasi Keluarga berpedoman pada keinginan untuk meningkatkan kemampuan literasi anggota keluarga. Oleh karena itu, pemahaman literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari, memperoleh, menginformasikan, dan mengolah kembali informasi perlu ditingkatkan di ranah keluarga. Untuk meningkatkan kemampuan literasi tersebut, peran keluarga sangat penting. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, dalam konteks pendidikan, menjadi lingkungan pembelajaran pertama dan utama bagi anak-anak. Untuk meningkatkan kemampuan literasi seluruh anggota keluarga diperlukan kegiatan-kegiatan yang mendukung berdasarkan lima fokus strategi.

1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
	1. Penyuluhan untuk orang tua atau asisten rumah tangga mengenai kompetensi berbagai bidang literasi dalam kegiatan sehari-hari; dan
	2. Pelatihan orang dewasa (misalnya, orang tua, asisten rumah tangga, atau orang dewasa lainnya yang mengasuh anak tersebut) untuk membuat alat yang dapat dimainkan di rumah.
2. Peningkatan Ragam dan Jumlah Sumber Bacaan Bermutu
	1. Penyediaan bahan bacaan di dalam keluarga;
	2. Penyediaan mainan edukatif yang dapat meningkatkan kecakapan anggota keluarga dalam berliterasi;
	3. Pemanfaatan fasilitas di rumah untuk tampilan-tampilan literasi;
3. Pemanfaatan media teknologi informasi (gawai) dalam kegiatan baca tulis dengan bimbingan orang tua; dan
4. Penyediaan bahan bacaan dengan berlangganan koran atau majalah.
5. Perluasan Akses terhadap Sumber Bacaan dan Cakupan Peserta Belajar
	1. Perluasan akses dengan mendorong anggota keluarga untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan literasi;
	2. Pengondisian lingkungan literasi dalam lingkungan rumah dan sekitarnya, misalnya pemajangan buku di berbagai tempat di rumah, gambar atau informasi ditempel pada sudut rumah.
	3. Pengoptimalan pemanfaatan jaringan internet untuk mengakses sumber-sumber belajar.
6. Penguatan Pelibatan Publik
	1. Penyelenggaraan kegiatan literasi dalam keluarga bersama masyarakat; dan
	2. Melibatkan orang tua dalam kegiatan program literasi di sekolah.
7. Penguatan Tata Kelola
	1. Penyediaan waktu tertentu dalam keluarga untuk melakukan aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi; dan
	2. Penyediaan dana untuk melakukan aktivitas bersama yang berkaitan dengan literasi.
8. Gerakan Literasi Masyarakat

Gerakan Literasi Masyarakat merupakan gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat, program-program literasi di masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdenyut dan berkelanjutan. Gerakan Literasi Masyarakat yang sejalan dengan Gerakan Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Keluarga diharapkan dapat melahirkan dan menumbuhkan simpul-simpul masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi tingkat tinggi. Berikut ini adalah strategi yang dapat diterapkan untuk mengimplementasikan literasi di masyarakat.

1. Peningkatan Kapasitas Fasilitator
	1. Pengadaan modul pelatihan dan penyuluhan untuk berbagai kalangan elemen masyarakat dan profesi; dan
	2. Pelatihan oleh komunitas penulis, penerbit, dan perguruan tinggi untuk pegiat literasi dalam membuat bahan bacaan dan menciptakan kegiatan-kegiatan berbasis literasi untuk anggota masyarakat yang didampingi.
2. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Bacaan Bermutu
	1. Pengoptimalan sumber belajar yang tersedia untuk masyarakat umum agar dapat digunakan oleh semua kalangan, seperti museum, perpustakaan umum, galeri seni dan budaya, dan lain-lain;
	2. Penyediaan koleksi bahan bacaan dengan berbagai jenis tema di perpustakaan umum atau daerah;
	3. Pemanfaatan akses internet untuk menjangkau bahan belajar daring; dan
	4. Penerjemahan bahan belajar yang berkaitan dengan literasi.
3. Perluasan Akses terhadap Sumber Bacaan dan Cakupan Peserta Belajar
	1. Penyediaan pojok baca di ruang publik, seperti terimal, halte, stasiun, bandara; di kantor pelayanan masyarakat, seperti bank, kantor pajak, rumah sakit, dan lain-lain;
	2. Pelaksanaan kampanye literasi untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan literasi kepada masyarakat;
	3. Pengondisian fasilitas umum yang kaya literasi; dan
	4. Penyebarluasan informasi mengenai sumber belajar daring.
4. Peningkatan Pelibatan Publik
	1. Pembentukan komunitas literasi yang melibatkan masyarakat luas; dan
	2. Pelibatan Dudi dan Bumn pada kegiatan literasi.
5. Penguatan Tata Kelola
	1. Pengintegrasian kegiatan literasi dalam berbagai kegiatan masyarakat;
	2. Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa/daerah untuk menjalankan kegiatan literasi; dan
	3. Pembentukan kerja sama antar pengelola belajar di masyarakat, seperti TBM dan PKBM.
6. **Kemandirian Belajar Siswa**
	1. Pengertian Kemandirian Belajar

Kemandirian adalah sikap penting yang wajib dimiliki seseorang supaya mereka tidak selalu bergantung dengan orang lain. Sikap tersebut bisa tertanam pada diri individu sejak kecil. Di sekolah kemandirian penting untukseorang siswa dalam proses pembelajaran. Pada bidang pendidikan seringdisebut dengan kemandirian belajar. Sikap ini diperlukan setiap siswa agarmereka mampu mendisiplinkan dirinya dan mempunyai tanggung jawab.

Menurut Mohammad Ali dan Mohammad Asrori kemandirian didefinisikan sebagai sebuah kekuatan internal individu dan diperoleh melalui proses individuasi, yang berupa proses menuju kesempurnaan dan proses realisasi kedirian. Tokoh lain seperti Hamzah B. Uno mengartikan kemandirian sebagai kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan diri dalam berpikir dan bertindak, serta tidak merasa bergantung pada orang lain secara emosional. Pada intinya, orang yang mandiri itu tanggung jawab, percaya diri, mampu bekerja sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain[[20]](#footnote-21).

Menurut Umar Tirta Rahardja dan La Sulo dalam Sri Septiyaningsihkemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh pilihan sendiri, kemauan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajar. Kemandirian disini, berarti lebih ditekankan pada individu yang belajar dan kewajibannya dalam belajar dilakukan secara sendiri dan sepenuhnya dikontrol sendiri[[21]](#footnote-22). Pengertian belajar mandiri menurut Hamzah B.Uno yaitu metode belajar dengan kecepatan sendiri, tanggung jawab sendiri, dan belajar yang berhasil[[22]](#footnote-23). Jadi, berhasil tidaknya dalam belajar semuanya ditentukan oleh pribadi tersebut.

Menurut Haris Mujiman belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yag telah dimiliki, atau motif untuk menguasai sesuatu kompetensi. Dalam penetepan kompetensi sebagai cara pencapaian dan tujuan belajarnya baik penetapan tempat belajar, waktu belajar, tempo belajar, irama belajar, sumber belajar, cara belajar, maupun evaluasi hasil belajar dilakukan sendiri.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar merupakan sikap individu khususnya siswa dalam pembelajaran yang mampu secara individu untuk menguasai kompetensi, tanpa tergantung dengan orang lain dan tanggung jawab. Siswa tersebut secara individu memiliki sikap tanggung jawab, tidak tergantung orang lain, percaya diri dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Kemandirian belajar ini sangat diperlukan siswa agar pencapaian prestasi belajar dapat optimal.

* 1. Ciri-ciri Kemandirian Belajar

Pada hakikatnya, kemandirian belajar lebih menekankan pada cara individu untuk belajar tanpa tergantung orang lain, tanggung jawab dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Belajar mandiri menurut Haris Mudjiman juga disebut sebagai belajarnya orang dewasa, karena cara belajarnya secara mandiri. Adapun ciri-ciri kemandirian belajar menurut Laird (dalam Haris Mujiman) diantaranya terdiri dari kegiatan belajar mengarahkan diri sendiri atau tidak tergantung pada orang lain, mampu menjawab pertanyaan saat pembelajaran bukan karena bantuan guru atau lainnya, lebih suka aktif daripada pasif, memiliki kesadaran apa yang harus dilakukan, evaluasi belajar dilaksanakan bersama-sama, belajar dengan mengaplikasikan (action), pembelajaran yang berkolaborasi artinya memanfaatkan pengalaman dan bertukar pengalaman, pembelajaran yang berbasis masalah, dan selalu mengharapkan manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan[[23]](#footnote-24).

Selain itu, belajar pendidikan orang dewasa juga disebutkan oleh Endang Poerwanti dan Nur Widodo dimana inti ciri-cirinya hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Haris Mujiman[[24]](#footnote-25). Adapun ciri-ciri tersebut yaitu, bahwa belajar merupakan kumpulan dari orang yang aktif berkegiatan, terdapatnya rasa saling menghormati dan mengahargai adanya perbedaan, percaya diri, suasana belajar yang kondusif dan adanya keterbukaan, memperbolehkan berbuat kesalahan, serta adanya evaluasi bersama dan sendiri.

Menurut Martinis Yamin dan Bansu I. Ansari menyebutkan bahwa, kemandirian belajar akan terwujud dalam proses pembelajaran manakala seorang guru memberikan peluang dan kesempatan kepada seluruh siswanya secara merata, sehingga semua siswa mempunyai kesempatan untuk selalu berkompetisi dan bersaing dengan siswa yang lainnya[[25]](#footnote-26). Belajar mandiri juga diartikan sebagai belajar yang otodidak tanpa ada seorang guru, bertanggung jawab dan percaya kepada dirinya sendiri. Selain dari pada itu, disebutkan juga bahwa dalam belajar mandiri perlu adanya tugas-tugas yang memungkinkan siswa bekerja secara mandiri. Belajar mandiri dapat didapat melalui tempat, sarana, sumber-sumber, dan lingkungan lainnya.

Tokoh lain seperti Mohammad Ali dan Mohammad Asrori membagi perkembangan kemandirian pada empat tingkatan, yaitu individualitas, tingkat saksama, tingkat sadar diri, dan mandiri[[26]](#footnote-27). Menurutnya baru dikatakan mandiri apabila telah mempunyai cara berpikir objektif dan realistis, mampu menyelesaikan konflik, memiliki kesadaran untuk menghargai, mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, dan memiliki keyakinan serta mengakui saling ketergantungan pada orang lain, dan keceriaan untuk mengungkapkan perasaannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan siswa dengan kemandirian belajar memiliki indikator diantaranya, tidak bergantung pada orang lain, memiliki sikap tanggung jawab, percaya diri, mampu mengontrol dirinya sendiri, mengevaluasi sendiri dan mempunyai kesadaran untuk belajar mandiri. Kemandirian belajar penting guna tercapainya prestasi belajar siswa yang optimal. Siswa yang memiliki indikator kemandirian belajar tersebut akan lebih baik dalam proses belajarnya.

* 1. Pengukuran Kemandirian Belajar[[27]](#footnote-28)

Pengukuran mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Pengukuran kemandirian belajar pada berdasarkan pada faktor internal (dari dalam diri) siswa yaitu motivasi, disiplin, percaya diri, inisiatif dan tanggung jawab.

1. Percaya diri

Menurut Thursan Hakim terdapat beberapa ciri-ciri tertentu dari orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, yaitu[[28]](#footnote-29):

1. Bersikap tenang didalam mengerjakan segala sesuatu
2. Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai
3. Mampu menetralisai ketegangan yang muncul didalam berbagai situasi
4. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi
5. Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya
6. Memiliki kecerdasan yang cukup
7. Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup
8. Memiliki keterampilan dan keahlian yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing
9. Memiliki kemampuan bersosialisasi
10. Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik
11. Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan didalam menghadapi berbagai cobaan hidup
12. Selalu bereaksi positif didalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup.

Para ahli berpendapat bahwa rasa percaya diri erat kaitannya dengan konsep diri, maka jika memiliki konsep diri yang negatif terhadap dirinya, maka akan menyebabkan orang tersebut memilki rasa tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Rasa percaya diri yang rendah akan berakibat pada tindakan yang tidak efektif..

Dalam tahapan ini, percaya diri siswa dapat dilihat pada tingkah laku siswa yang muncul selama proses kegiatan pembelajaran PAI berlangsung. Percaya diri siswa pada proses pembelajaran mata pelajaran PAI dapat diamati berdasarkan lima kriteria yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan presentasi di depan kelas
2. Ketenangan dalam berbicara
3. Ikut serta dalam mengajukan pertanyaan
4. Ikut serta dalam menjawab pertanyaan
5. Ikut serta dalam berpendapat
6. Disiplin

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri atau kepatuhan seseorang untuk mengikuti bentuk-bentuk aturan atas kesadaran pribadinya, disiplin dalam belajar merupakan kemauan untuk belajar yang didorong oleh diri siswa sendiri.

Dalam penelitian ini, kedisiplinan siswa dapat diamati dari tingkah laku yang Nampak selama proses pembelajaran berlangsung. Disiplin siswa dalam proses pembelajaran bisa diamati berdasarkan lima aspek yaitu kriteria siswa dalam hal:

1. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
2. Semangat dan antusias dalam kegiatan pembelajaran
3. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
4. Mengatasi kesulitan yang timbul pada dirinya
5. Kemampuan memimpin
6. Inisiatif

Berkaitan dengan definisi beberapa tokoh maka pengertian Inisiatif merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru baik berupa karya nyata maupun gagasan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam usaha memecahkan suatu masalah. Inisiatif yang dimaksudkan dapat dilihat dalam proses kegiatan pembelajaran. Inisiatif siswa yang diamati meliputi:

1. Memiliki dorongan rasa ingin tahu yang tinggi
2. Keterampilan berfikir luwes
3. Keterampilan berfikir lancer
4. Keterampilan berfikir orisinil
5. Berani mengambil resiko
6. Tanggung jawab

Menurut Hartinah mengungkapkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat tanggung jawab sebagai berikut[[29]](#footnote-30):

* 1. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaannya
	2. Mau bertanggung jawab
	3. Energik
	4. Berorientasi ke masa depan
	5. Kemampuan memimpin
	6. Mau belajar dari kegagalan
	7. Yakin pada dirinya
	8. Obsesi untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Dalam penelitian ini tanggung jawab siswa dapat dilihat selama proses pembelajaran mata pelajaran PAI yang diamati berdasarkan lima aspek, yaitu:

* 1. Siswa ikut serta melaksanakan tugas yang diberikan kelompok
	2. Siswa ikut serta dalam memecahkan masalah
	3. Siswa peduli terhadap kesulitan sesama anggota kelompok
	4. Siswa ikut serta dalam membuat laporan kelompok
	5. Siswa ikut serta dalam melaksanakan presentasi hasil diskusi
1. Motivasi

Menurut Suryana “Seseorang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang mengutamakan nilai-nilai motivasi, berorientasi pada ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai energik dan berinisiatif”[[30]](#footnote-31).

Menurut Suryana” Seseorang memiliki motivasi tinggi apabila orang tersebut memiliki hasrat untuk mencapai hasil yang terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Faktor dasarnya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi”. Menurut Suryana” Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut[[31]](#footnote-32):

* 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan dan permasalahan yang timbul pada dirinya
	2. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan
	3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi
	4. Berani menghadapi resiko dengan penuh tantangan
	5. Menyukai dan melihat tantangan secara seimbang

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi adalah seseorang yang selalu melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibanding sebelumnya. Dalam penelitian ini siswa yang memiliki motivasi tinggi dapat diamati selama proses pembelajaran berlangsung. Indikator yang digunakan untuk mengamati siswa dengan motivasi tinggi diantaranya:

* 1. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
	2. Semangat dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung
	3. Komitmen yang tinggi terhadap tugas
	4. Mengatasi sendiri kesulitan yang timbul pada dirinya
	5. Kemampuan memimpin
1. **Akselerasi Mutu Pendidikan Melalui Program Gerakan Literasi Sekolah dalam Meningkatkan Kemandirian Sisiwa Pada Mata Pelajaran PAI**
2. Bentuk-bentuk akselerasi mutu pendidikan melalui program GLS dalam peningkatan kemandirian siswa

Pandangan peneliti tentang bentuk-bentuk akselerasi mutu mempunyai berbagai sistem maupun konsep pengembangan, hal itu tidak jauh beda dari pandangan berbagai tokoh yang sudah dijelaskan panjang lebar diatas. Ada bebrapa penawaran konsep dalam peningkatan mutu salah satunya adalah William Edward Deming yang dikenal dengan konsepnya siklus PDCA[[32]](#footnote-33). Dimana konsep ini menekankan pada adanya *planning, Do, Chek* dan *Act.* Keempat poin ini menjadi landasan teori yang dikemukan oleh Deming dalam pengembangan mutu.

Selain dari konsep Deming, Joseph M. Juran juga mempunyai konsep peningkatan mutu yang dikenal dengan teori trilogi kualitas. Dimana konsep Juren menjelaskan tentang adanya pelaksanaan Perencanaan Kualitas (quality planning), Pengendalian Kualitas (quality control), dan Perbaikanan Kualitas (quality improvement)[[33]](#footnote-34).

Konsep lain juga ditawarkan oleh Feigenbaum inti dari konsepnya adalah (1) kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan, (2) kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara komprehensif, dan (3) karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka mutu adalah dinamis.

Tokoh yang keempat adalah Garvin dan Davis menjelaskan bahwa teori mutu diartikan suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Dari keempat tokoh di atas, peneliti lebih cenderung menggunakan teori mutu yang ditawarkan oleh Joseph M. Juran melalui konsep trilogi kualitas dimana pada akhirnya ini menjadi landasan peniliti dalam melakukan penelitian sebagai pisau analisa untuk menhasilkan penelitian yang benar-benar valid dan terarah. Program akselerasi mutu disini dimana sudah dilaksanakan di SMA Negeri 02 Bondowoso dari tahun 2013 sampai sekarang dengan program pengembangan mutu pendidikannya melalui pelaksanaan program literasi sekolah. Dari program GLS yang sudah dilaksanakan diharapkan mampu mencetak siswa yang kreatif diberbagai hal serta mandiri dalam mengatasi problem-problem pribadinya sebagai pembelajar.

1. Manajemen Pelaksanaan Akselerasi Mutu pendidikan melalui program GLS dalam peningkatan kemandirian siswa

Dari Konsep Juran yang kemudian diterapkan dalam program gerakan Literasi Sekolah (GLS) bahwa pengembangan mutu pendidikan diharuskan adanya perencanan yang terarah pada visi-misi sekolah dengan disusun program-program kerja yang menopang pada terwujudnya visi maupun misi sekolah. Selain dari perencanaan kualitas, pengendalian kualitas benar-benar dapat diuji, dilaksanakan, serta dapat menunjang pada perkembangan peserta didik, dengan demikian siswa sebagai warga sekolah akan mampu mengenali dirinya sebagai pembelajar dan tidak lagi bergantung belajarnya kepada gurunya[[34]](#footnote-35).

Sementara untuk pelaksanaan akselerasi mutunya menggunakan konsep dari    George R. Terry yang kita kenal dengan konsep POAC didalamnya terdapat komponen *Planing, Organizing, Actuating,* dan *controlling[[35]](#footnote-36).* Konsep tersebut akan menjadi penopang dalam pelaksanaan akselerasi mutu pendidikan dilembaga pendidikan, menjadi keharusan merencanakan program sekolah mulai dari program jangka pendek, menengah maupun program jangka panjang.

Penerapan program gerakan literasi sekolah atau kita kenal dengan pemanfaatan segala komponen atau media pembelajaran disekolah dapat mengembangakan mutu, program, maupun kulaitas pembelajaran yang dibuktikan dengan adanya prestasi siswa yang sudah diraih baik ditingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional.

Dengan kata lain, sudah seharusnya lembaga-lembaga pendidikan mulai mengevaluasi apakah visi-misi lembaganya sudah tercapai sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketika visi sekolah sudah terwujud maka para pemangku lembaga pendidikan mempunyai tugas perbaikan kualitas pembelajaran yang ada disekolah yang dipimpinnya. Hai itulah yang sering terjadi di sekolah banyak lembaga pendidikan yang tidak lagi berbicara tentang bagaiamana pengembangan kualitas tetapi lebih menngarah pada pembenahan sekolah yang masih belum memenuhi 8 standar pendidikan, sehingga menjadi hal yang tidak mungkin bagi sekolah untuk memikirkan pengembangan kualitas pendidikan.

1. Dampak pelaksanaan akselerasi mutu pendidikan melalui program GLS dalam peningkatan kemandirian siswa

Dampak positif yang Nampak dalam pelaksanaan akselerasi mutu pendidikan melalui program GLS adalah sikap kemandirian siswa yang tidak lagi bergantung kepada guru sebagai pengajar di satuan pendidikan, melainkan guru hanya sebagai fasilitator terjadinya proses pembelajaran. Sikap kemandirian siswa dikarenakan adanya program sekolah yang selalu membuat perubahan program yang selalu mengarah pada peningkatan mutu sekolah, dimulai dari pembiasaan siswa belajar sendiri disekolah, mengenalkan dengan berbagai pembelajaran secara online atau *Digital Education* sebagai media utama di sekolah.

Tujuan urgensi pengembangan mutu pendidikan menurut anonim bertrujuan untuk[[36]](#footnote-37):

1. Peningkatan mutu pendidikan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
2. Mengembangakan kepedulian semua warga sekolah terhadap mutu pendidikan;
3. Mengembangkan peran semua warga sekolah, orang tua dan pemerintah;
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai

Sementara itu, alasan kenapa perlu diterapkannya mutu pendidikan di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kelemahan, peluang, kekuatan, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya;
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan di dayagunakan dalam prosese pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik;
3. Pengambilan keputusan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat;
5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat;
6. Sekolah mampu bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya;
7. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Selain dari sikap kemandirian belajar, prestasi siswa juga akan semakin meningkat karena mereka sudah terbiasa dengan mengembangkan potensi dirinya, dimana asumsi yang mereka ingat bahwa pendidikan tidak lagi sebagai rutinitas aktifitas, melainkan sebagi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang.

1. Jerome S. Arcaro,, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. (Yosal Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.56 [↑](#footnote-ref-2)
2. Suryadi Ace dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar;* (Bandung : PT. Remaja Roesda Karya, 1994).h.77 [↑](#footnote-ref-3)
3. W. Edwards Deming, *Out of the Crisis,* (MIT Center for Advanced Engineering Study, 1986), h. 67. [↑](#footnote-ref-4)
4. Deming dalam Jerome S Arcaro, (*Terjemahan Yosal Iriantara), Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 85-89. [↑](#footnote-ref-5)
5. Safrudin, *Mengenal Konsep Trilogi Juran*, diakses dari www.safruonline.blogspot.com, pada tanggal 21 maret 2018 Pukul 19.30 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
6. Sopie Najah, *Kuliah Manajemen*, Diakses dari http:/kuliahekonomi.blogspot.co.id, pada tanggal 26 0ktober 2018 pukul 16.35 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
7. Edward Sallis, Op. Cit., h.108. [↑](#footnote-ref-8)
8. Sallis E, *Total Quality Management in Education*, IRCiSoD. (Yogyakarta: 2008), h.43 [↑](#footnote-ref-9)
9. Op.Cet. h. 50 [↑](#footnote-ref-10)
10. Anon, *Total Quality Management (TQM) from Quality to Excellence, Departmen of Trade and Industri*, [www.dti.gov.uk/quality/tqm](http://www.dti.gov.uk/quality/tqm)Dikutip 22 September 2014. [↑](#footnote-ref-11)
11. Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85-86. [↑](#footnote-ref-12)
12. Slamet Margono, *Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Terpadu,* (Bogor: Pustaka Ilmu, 2007), h. 13. [↑](#footnote-ref-13)
13. Buchari Alma, *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan: Fokus Pada Mutu dan Layanan Prima*, (Badung: Alfabeta, 2008.), 48 [↑](#footnote-ref-14)
14. Jerome S Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu : Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 74 [↑](#footnote-ref-15)
15. Tadkiroatun Musfiroh, *Konstruk Kompetensi Literasi Untuk Siswa Sekolah Dasar Jurnal nasional LITERA,* Volume 15, Nomor 1, April 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. Sekretariat TIM GLN *Kemendikbud Jalan Daksinapati Barat IV*, (Rawamangun, Jakarta Timur: 2013), 21 [↑](#footnote-ref-17)
17. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Panduan Gerakan Literasi di Sekolah Menengah Atas, tersedia dari: <http://dikdas.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Panduan-Gerakan-Literasi-Sekolah-di-SMA.pdf>, diunduh pada 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-18)
18. Kisyani Laksono, Dkk. *Panduan Gerakan Literasi di SMA,* Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendiddikan dan Kebudayaan (Jakarta: 2016), 75 [↑](#footnote-ref-19)
19. UNESCO. 2004. *The Plurality Of Literacy And Its Implications For Policies And Programmes. Paris* : *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.(ebook)*,http://u nesdoc.unesco.org/images/00 13/001362/136246e.pdf, diakses 14 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2014), h.68 [↑](#footnote-ref-21)
21. Sri Septianingsih, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Pengaruh Aktifitas Belajar dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa,*Volume 6, Nomor 3, Tahun 201, h.269 [↑](#footnote-ref-22)
22. Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis di Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), cet.4, h.57 [↑](#footnote-ref-23)
23. Haris Mudjiman,  *Belajar Mandiri*. (Surakarta: UNS PRESS, 2007), 89 [↑](#footnote-ref-24)
24. Endang Poerwanti dan Nur Widodo, *Asesmen Pembelajaran SD*, (Jakarta: Depdiknas: 2008), h.59 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ansari Bansu I dan Martinis Yamin, *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa*, (Jakarta: GP Press Group: 2012), h.73 [↑](#footnote-ref-26)
26. Mohammad dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara: 2014), h.72 [↑](#footnote-ref-27)
27. Familia, *Membuat Prioritas Melatih Anak Mandiri,* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 57 [↑](#footnote-ref-28)
28. Thursan Hakim, *Konselor dan Pembimbing Meditasi*, *Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri,* (Jakarta: Puspa Swara: 2002), h.39 [↑](#footnote-ref-29)
29. Siti Hartinah, *Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2009), 95 [↑](#footnote-ref-30)
30. Suryan, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba: 2006), h.51 [↑](#footnote-ref-31)
31. Hasan Basri, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja dan Solusinya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 65 [↑](#footnote-ref-32)
32. Jerome S. Arcaro,, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. (Yosal Iriantara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.56 [↑](#footnote-ref-33)
33. Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85-86. [↑](#footnote-ref-34)
34. Sekretariat TIM GLN *Kemendikbud Jalan Daksinapati Barat IV*, (Rawamangun, Jakarta Timur: 2013), 21 [↑](#footnote-ref-35)
35. George Terry, *dasar-dasar manajemen,* (Jakarta, PT Bumi Aksara; 2010), 48 [↑](#footnote-ref-36)
36. Anonim, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.* Jakarta Depdiknas. 2002. [↑](#footnote-ref-37)